

Vol. 5 (2), Desember 2022, pp. 121-133

ISSN 2614-140X (Online)

Journal homepage. <http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb>

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SULTRA

Dian Astuti¹⁾ Abdul Razak²⁾ Rachmawati³⁾

^{1,3}Program Studi Akuntansi, STIE Enam Enam Kendari

²Program Studi Manajemen, STIE Enam Enam Kendari

email: dianastuti983@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Sultra dapat dikatakan sudah efektif dalam menjalankan operasional perusahaannya, khususnya dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kata Kunci : Sistem pengendalian *intern*, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Abstract

This study aims to determine the internal control system for the provision of People's Business Credit (KUR) at Bank Sultra, as well as to identify the inhibiting and supporting factors in the provision of People's Business Credit (KUR) at Bank Sultra. This study employed descriptive qualitative research. Data collection techniques included interviews and documentation. The results indicate that the internal control system for the provision of People's Business Credit at Bank Sultra can be considered effective in carrying out the company's operations, particularly in the provision of People's Business Credit (KUR), as well as the supporting and inhibiting factors in the provision of People's Business Credit (KUR).

Keywords: Internal control system, People's Business Credit (KUR)

PENDAHULUAN

Negara yang berhasil dapat dilihat dari segi pembangunan terutama dibidang perekonomian. Perekonomian akan menjadi dasar untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dan di bidang lainnya. Indonesia adalah Negara yang berkembang, sehingga sangat diperlukan sebuah strategi yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan sektor pembangunannya. Keberhasilan pembangunan di bidang perekonomian akan tercapai apabila masyarakat mampu mengoptimalkan usaha-usaha yang dijalankannya. Seperti industri, pertanian, peternakan, perikanan dan semua hal yang menyangkut usaha. Masyarakat adalah dasar untuk mengembangkan pembangunan di Negara ini, tetapi tidak semudah itu untuk memperoleh bantuan kredit dari pihak perbankan (Safirah, 2018).

Peran pentingnya lembaga keuangan atau perbankan di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya membutuhkan jasa melalui lembaga keuangan. Sebagaimana yang telah diketahui saat ini peranan bank sangat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat, maupun pemerintahan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga bank telah dianggap menjadi roda modal bagi masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit (Kasmir, 2014;25).

Kasmir (2019), menjelaskan kredit yang diperoleh perusahaan memiliki peran penting untuk memenuhi dana, pertimbangan utama dari perusahaan untuk memperoleh dana tersebut yaitu memang dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan manfaatnya. Adapun keuntungan yang diperoleh dari dana kredit yaitu penggunaan modal pinjaman dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih giat guna memenuhi kewajiban untuk pengembalian dana tersebut. Pemerintah memberlakukan program kredit yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon serta intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007. KUR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi. KUR bertujuan untuk mengselesakan pengembangan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan serta dapat memperluas kesempatan kerja (Putra, Semara 2013).

Dina Marayanti Hutaeruk (2019), menjelaskan BPD Sultra sepanjang tahun 2018 masih belum optimal dalam penyaluran KUR, dikarenakan penyaluran KUR terkendala karena baru diberikan jadwal untuk mengisi aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 KUR baru bisa dilaksanakan mulai September. BPD Sultra hanya mampu merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp25 miliar atau 13,6% dari jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp183 miliar. Dengan capaian tersebut maka pada tahun 2019 BPD Sultra hanya mendapatkan kuota sebesar Rp30 miliar. Untuk memaksimalkan penyaluran KUR tahun 2018 Bank Sultra telah melakukan pembinaan terhadap satu angkatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Permasalahan kredit merupakan masalah utama yang harus diperhatikan, karena adanya resiko yang mungkin terjadi dalam sistem pemberian kredit. Masalah yang sering terjadi dalam pemberian kredit yaitu kemacetan pembayaran atau pengembalian utang yang dilakukan oleh nasabah. Terjadinya kemacetan kredit yang dilakukan oleh nasabah akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup operasional perusahaan, oleh karena itu diperlukan suatu pengendalian *intern* dalam pemberian kredit, agar kredit yang disalurkan berjalan dengan efektif dan terhindar dari segala bentuk penyelewangan (Wanangsari, & Iwan 2016).

Pihak perbankan sangat membutuhkan adanya pengawasan atau pengendalian *intern* yang baik terhadap perusahaan akan dapat meminimalisir adanya resiko-resiko yang muncul. Terwujudnya pengendalian internal yang efektif, perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi serta didukung dengan karyawan yang berkualitas. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mengevaluasi sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra.
2. Untuk mengevaluasi dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2013), sistem pengendalian *intern* meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian *intern* yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian *intern* yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap keuntungan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dana penganggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian *intern* bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Evaluasi sistem pengendalian *intern* pemberian kredit seharusnya sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian *intern* disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Manajemen merencanakan sistem pengendalian *intern* yang efektif dengan empat (4) tujuan pokok berikut ini (Mulyadi, 2013) yaitu :

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan
Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktivitas perusahaan.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Keandalan data/ informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi
Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan membantu setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian *intern* yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian *Intern*

Untuk dapat menyelenggarakan suatu pengendalian *intern* yang berhasil dan memuaskan, menurut Mulyadi (2013:164), ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi. Unsur-unsur pengendalian *intern* yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Komponen Pengendalian Internal COSO

Komponen pengendalian *intern* menurut *the Committee of Sponsoring Organization (COSO)* ada lima (Halim, Abdul, 2015) yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian (*Control environment*).
Suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
- 2) Penaksiran risiko (*Risk assessment*)
Merupakan proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/ mengendalikannya.
- 3) Aktivitas pengendalian (*Control activities*)
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arah telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
- 4) Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian *intern* perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan *monitoring* diperlukan sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan- peraturan yang berlaku pada perusahaan.
- 5) Pemantauan (*Monitoring*)
Merupakan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menentukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di *monitoring* dengan baik, dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda- tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur koperasi atau kegiatan usaha.

Pengertian Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014 : 88) adalah sebagai berikut:

1) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mencari memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah.

2) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dana memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Jenis-Jenis Kredit

Kasmir (2012), Jenis- jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dapat dilihat dari berbagai macam segi yakni :

1) Dilihat dari segi kegunaan

Kredit dapat dilihat dari segi kegunaannya untuk melihat penggunaan uang tersebut digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dari segi kegunaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Kredit Investasi, biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan, perluasan usaha atau pembangunan proyek yang dimana masa pemakaiannya digunakan untuk suatu periode yang relatif lama dan biasanya digunakan untuk kegiatan utama perusahaan.
- b) Kredit modal kerja, biasanya kredit ini digunakan untuk masing- masing produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, serta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses kegiatan produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit ini dapat dilihat dari segi tujuan pemakaian suatu kredit. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a) Kredit *produktif*, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi/ investasi.
- b) Kredit *konsumtif*, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara keperluan pribadi.
- c) Kredit perdagangan, digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

Kredit dapat dilihat dari lamanya masa pemberian kredit dimulai dari pertama hingga sampai pelunasannya yang digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit dari segi jangka waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Kredit jangka pendek, artinya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun/ biasanya paling lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit jangka menengah, artinya memiliki jangka waktu berkisar satu tahun atau sampai tiga tahun.
- c) Kredit jangka panjang, artinya kredit yang masa pengambilannya paling panjang diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau, manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

Kredit dapat dilihat dari segi jaminan artinya setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi oleh suatu barang atau surat- surat berharga yang senilai dengan kredit yang diberikan. Kredit ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Kredit dengan jaminan, artinya kredit ini dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Seperti kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai dengan jaminan yang akan diberikan kepada debitur.
 - b) Kredit tanpa jaminan, artinya kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
- 5) Dilihat dari segi sektor usaha
- Pemberian fasilitas kredit dapat dilihat dari jenis sektor usaha yaitu:
- a) Kredit pertanian, artinya kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b) Kredit peternakan, artinya dapat diberikan dalam jangka waktu yang relatif pendek seperti peternak ayam, serta kredit jangka panjang seperti peternak kambing atau sapi.
 - c) Kredit industri, artinya kredit ini untuk pembiayaan industri pengolahan seperti industri kecil, menengah, atau besar.
 - d) Kredit pertambangan, artinya untuk jenis kredit usaha tambang yang dibiayai, biasanya kredit ini relatif jangka panjang. Seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
 - e) Kredit pendidikan, artinya kredit yang diberikan untuk membangun sarana serta prasarana pendidikan serta dapat dikatakan kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
 - f) Kredit profesi, artinya kredit yang diberikan kepada kalangan profesional. Seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
 - g) Kredit perumahan, artinya kredit untuk biaya pembangunan atau pembelian rumah.
 - h) Serta sektor- sektor lainnya.

Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur pemberian kredit menurut (Kasmir, 2019) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan
Kepercayaan yaitu pihak bank percaya bahwa nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan, pertimbangan yang diberikan oleh pihak bank yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini nasabah memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.
- 2) Kesepakatan
Unsur percaya dimana kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian akad kredit yang ditanda tangai oleh kedua belah pihak dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek (dibawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengendalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Risiko
Akibat adanya tengang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan terjadinya suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, maka bank biasanya memberi syarat suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit yang akan diberikan, atau bank dapat juga dengan menjaminkan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang terjadi.
- 5) Balas Jasa
Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C dan 7P pemberian kredit menurut (kasmir, 2012) yaitu sebagai berikut:

1. Adapun analisis 5C dalam pemberian kredit yakni sebagai berikut:

- a.) *Character* (Karakter), yaitu bertujuan untuk memberi suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
 - b.) *Capacity* (Kemampuan), yaitu untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan mengelola bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
 - c.) *Capital* (Modal), yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.
 - d.) *Collateral* (Jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang diberikan fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
 - e.) *Condition* (Kondisi), yaitu dalam melalui kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.
2. Adapun analisis 7P dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut:
- a.) *Personality* (Kepribadian), yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
 - b.) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
 - c.) *Perpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi dan lainnya.
 - d.) *Prospect*, yaitu untuk meninjau usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingatkan jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
 - e.) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak penghasilan debitur, akan semakin baik.
 - f.) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.
 - g.) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya yaitu usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Yang dimana masyarakat diharapkan dapat mengakses KUR. KUR dapat bergerak di skor usaha produktif antara lain: pertanian, perkebunan, dan peternakan. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya masyarakat dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan KSP/ USP Kopesi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Redaksi PUBinfo, 2014).

KUR merupakan kredit/ pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang di rencanakan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana Bank. Pemerintah memberikan

penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh beberapa bank pelaksana yaitu : Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, serta bank lainnya.

Ketentuan Pokok KUR

Adapun ketentuan pokok KUR menurut (Pedoman Teknis, 2013) yaitu :

1. Sumber dana KUR sepenuhnya dari bank pelaksana, sebagian resiko kredit pembiayaan dicover oleh perusahaan penjamin.
2. Calon debitur KUR sektor pertanian dengan kriteria :
 - a) Memiliki usaha dibidang pertanian mulai hulu, usaha primer (budaya) dan hilir.
 - b) Tidak sedang menerima kredit/ pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID), kecuali debitur sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) asih dapat menerima KUR.
 - c) Besarnya kredit/ pembiayaan KUR maksimu Rp500 juta per debitur.
 - d) Besarnya KUR ritel lebih dari Rp20 juta, tidak diipersyaratkan agunan tabahan.
 - e) Besarnya KUR Ritel lebih dai Rp50 juta sampai dngan Rp500 juta.
 - f) Suku bunga:
 - 1) Suku bunga unuk KUR Mikro (kredit s.d Rp20 juta) maksimum 22% pertahun efektif, serta dengan flat per bulan : 0,95%.
 - 2) Suku bunga untuk KUR Ritel (kredit lebih dari Rp20 juta sampai Rp500 juta) maksimum 7% per tahun efektif, sertara dengan flat per bulan : 0,57%.
 - g) Mekanisme penyaluran KUR:
 - 1) Langsung kepada debitur.
 - 2) Tidak langsung mlalui lembaga *linkage*.
 - 3) Khusus penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dapat dilakukan dengan pola *Excuting* atau *Channeling*.
 - h) Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *excuting* dengan ketentuan :
 - 1) Plafon kredit kepada lembaga *linkage* maksimum Rp2 miliar.
 - 2) Suku bunga dari perbankan kepada lembaga *linkage* maksimum 13% per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,57%.
 - 3) Plafon kredit dari lembaga *linkage* kepada debitur maksimum Rp100 juta per debitur, dengan suku bunga maksimum 22% per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,95%.
 - 4) Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari bank pelaksana.
 - 5) Lembaga *linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah.
 - i) Penyalurah KUR melalui *linkage* dengan pola *chanelling*, dengan ketentuan:
 - 1) Plafonan suku bunga mengikuti ketentuan KUR mikro dan KUR ritel.
 - 2) Debitur KUR bertanggung jawab atas pengembalian KUR.
 - 3) Lembaga *linkage* memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan maupun kredit program pemerintah.
 - j) Besarnya Penjaminan oleh perusahaanpenjamin untuk sektor pertanian sebesar 80% dari kredit pembiayaan yang diberikan perbankan.
 - k) Jangka Waktu Kredit:
 - 1) Kredit modal kerja maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sampai 6 tahun.
 - 2) Kredit investasi maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun.
 - 3) Khusus kredit investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimum 13 tahun.

Persyaratan Debitur

Adapun persyaratan debitur menurut (Pedoman Teknis, 2013) yaitu :

- 1) Individu : petani/ peternak/ pekebun dengan syarat :
 - a) Mempunyai identitas diri;
 - b) Memiliki usaha di bidang pertanian;
 - c) Usahanya layak (*feasible*) dan belum *bankable*;
 - d) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- 2) Kelompok Tani, Gapoktan yang dibina oleh Dinas Teknis/ Badan setempat, Kantor Cabang Dianas/ Balai Penyuluh Pertanian.
- 3) Koperasi mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai anggota terdiri dari petani.
- 4) Kelompok usaha, badan usaha, pelaku agribisnis lain memiliki usaha dibidang pertanian, lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Ketentuan lain yang ditetapkan perbankan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam melakukan penelitian, setelah mendapatkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Sehingga kesimpulan dan saran penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan tentang sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh kerangka pemikiran yaitu: Sistem pengendalian internal yang ada dalam penelitian ini merujuk pada teori (Halim, Abdul, 2015) yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu:

- a.) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- b.) Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)
- c.) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- d.) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- e.) Pemantauan (*Monitoring*)

Selain itu, penelitian ini juga di *explorasi* oleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Kemudian dapat diperoleh kerangka pikir.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu mengevaluasi sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama, yang berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No. 95, Watu-Watu, Kendari Barat.

Instrumen Penelitian

Sugiyono (2012:222), menjelaskan dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara, atau pedoman dokumentasi, sesuai dengan metode yang digunakan.

Adapun instrumen yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini menurut teori (Halim, Abdul, 2015) yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)
- b. Penaksiran risiko (*Risk assessment*)
- c. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)
- d. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)
- e. Pemantauan (*Monitoring*)
- f. Faktor pendukung
- g. Faktor penghambat

Jenis data & Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Kuantitatif menurut Sugiyono, 2015 menjelaskan bahwa data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa jumlah pegawai atau informan yang bergerak dibidang pemberian kredit usaha rakyat (KUR).
2. Data Kualitatif menurut Sugiyono, 2015 menjelaskan bahwa data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka, skema, serta gambaran. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data, yaitu data primer, dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder yang dimaksud yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara *survey* lapangan yang menggunakan semua metode original. Artinya data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang terkait pada lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (*monitoring*), faktor pendukung, serta faktor penghambat (Mudrajad Kuncoro, 2013: 148).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang oleh lembaga pengumpulan data dan di publikasikan ke masyarakat pengguna data (Internet). Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti. Seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal, dan sumber data lainnya yang tentu membantu peneliti hingga dapat terkumpul data yang berguna untuk penelitian ini (Mudrajad Kuncoro, 2013).

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara yang akurat dan relevan, serta yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangan. Sugiyono (2018), menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data, metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan), sedangkan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini merupakan wawancara yang bersifat formal, peneliti menggunakan wawancara yang disusun dengan cara sistematis serta lengkap untuk proses pengumpulan datanya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti buku (catatan resmi), catatan harian dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kamera smartphone sebagai alat untuk melakukan dokumentasi atau sebagai alat bukti (Arikunto S, 2017).

Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu trigulasi. Trigulasi merupakan sebagai pengecekan data dari sumber dan berbagai waktu. Trigulasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu menguji kualitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui informan, sehingga data yang diperoleh dapat dievaluasi oleh peneliti. Sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Sugiyono (2017: 274), untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data biasa melalui wawancara, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber-sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triagulasi Waktu

Sugiyono (2017: 274), Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih semangat akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni dengan cara mengevaluasi kembali data-data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Serta membandingkan dengan teori-teori yang relevan yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu variabel berdasarkan kondisi yang terjadi pada objek penelitian. Adapun spesifikasi dari variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian *intern* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk mendukung satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional suatu perusahaan.
2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang dimana pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo, atau pada saat waktu yang telah di sepakati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian *Intern* Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra

Aspek-aspek dalam pengendalian *intern* menurut teori (Halim Abdul, 2015) dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan data yang di peroleh maka dapat di jelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environtmen*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait lingkungan pengendalian, Bank Sultra dalam penerapan lingkungan pengendaliannya sudah memadai, yang dimana perusahaan tersebut sudah memiliki struktur organisasi, memiliki nilai etika yang baik, serta telah memiliki standar dan aturan dalam perusahaan.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait penilaian risiko, Bank Sultra dalam penilaian risiko sudah memadai, dimana perusahaan sudah menerapkan komitmen terhadap karyawannya, telah memiliki tindakan untuk mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta telah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait aktivitas pengendalian, dalam aktivitas pengendalian Bank Sultra sudah cukup memadai, karena perusahaan telah menerapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), telah melakukan pemisahan tugas, serta telah memiliki tindakan untuk menghadapi pesaing.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Comunication*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan terkait informasi dan komunikasi, dalam informasi dan komunikasi Bank Sultra sudah cukup memadai dilihat dari segi komunikasi pimpinan terhadap karyawannya, sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pencatatan dalam pemberian kredit.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait pemantauan (*monitoring*), Bank Sultra sudah cukup memadai, dimana perusahaan telah melakukan pengawasan atau *monitoring*

pengendalian internal, evaluasi monitoring atau pemantauan, serta melakukan pelaporan hasil *monitoring* atau pemantauan dan menilai hasil perusahaan sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan pengendalian *intern* perusahaan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan hal tersebut tentu ada faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti yang dijelaskan oleh informan pada Bank Sultra yang menjadi faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :

Berdasarkan wawancara bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu: 1) karena adanya animo atau keinginan dari masyarakat untuk lebih maju, 2) karena peluang kredit KUR untuk daerah Sulawesi Tenggara masih sangat di butuhkan oleh masyarakat, 3) Karena sumber daya manusia yang memadai dalam proses pemberian kredit KUR, dan 4) Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.

Selain faktor pendukung tentu ada faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Seperti yang di jelaskan oleh informan pada Bank sultra, yang menjadi faktor penghambat pada pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yaitu:

Berdasarkan wawancara bahwa terkait faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu: 1) Ketidak sesuaian calon debitur dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian, 2) Kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa kredit KUR ini adalah bantuan, 3) Di sebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak *support* atau tidak mendukung terhadap pemberian kredit KUR seperti pada kondisi saat munculnya wabah *Covid-19*, 4) Masyarakat yang tidak mempunyai usaha maka tidak diberikan pinjaman dalam artian permohonan kredit ditolak, dan 5) Kurang bagus jalannya menuju lokasi *survei* masyarakat yang mngambil kredit KUR.

PEMBAHASAN

Evaluasi Sistem Pengendalian *Intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra

Evaluasi yang terkait pada sistem pengendalian *intern* dalam pemberian kredit usah rakyat (KUR) pada Bank Sultra dapat di lihat dari beberapa penjelasan hasil uraian evaluasi yakni sebagai berikut:

1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan struktur organisasi, penilaian etika, serta standar dan aturan dalam pemberian KUR. Jika di lihat dari hal tersebut, maka ketepatan dalam suatu perusahaan dapat di nilai sudah efektif. Di karenakan Bank Sultra sudah memiliki struktur, fungsi, dan tugasnya dengan jelas, dan telah menerapkan penilaian etika manajemen serta telah menerapkan standar atau aturan dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sebuah perusahaan.

2. Evaluasi Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko dapat mengidentifikasi serta menilai risiko-risiko yang di hadapi dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan. Bank Sultra telah menerapkan penaksiran risiko dengan baik berdasarkan standar serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan dalam mencapai sebuah target dari perusahaan tersebut. Risiko- risiko yang tidak di inginkan oleh perusahaan bisa saja terjadi, maka dari itu perusahaan harus bisa meminimalisir risiko-risiko yang terjadi. Dan audit internal juga bertugas untuk memantau karyawannya dalam menganalisa informasi dan komunikasi yang di laksanakan antara lain: 1). Kepatuhan terhadap standar dan prosedur perusahaan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), 2). Memenuhi syarat- syarat dalam kelengkapan administrasinya, dan 3). Pengamatan Asset.

3. Evaluasi Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan serta prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahnya telah dilaksanakan. Evaluasi aktivitas pengendalian pada Bank Sultra telah di jalankan serta telah di terapkan dengan baik dengan cara melakukan pemisahan tugas, memiliki tindakan untuk menghadapi sebuah pesaing serta telah memiliki dan menerapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dengan baik.

4. Evaluasi Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dari sebuah pengendalian *intern* suatu perusahaan, guna untuk mengetahui informasi terkait lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau *monitoring* sebagai pedoman operasional dan dapat menjamin ketaatan dalam pelaporan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bank Sultra dalam mengevaluasi informasi dan komunikasi terhadap pemberian kredit KUR telah dilakukan dengan baik dengan cara pencatatan transaksi pada kredit masuk, menjalankan sistem dan prosedur dalam pemberian kredit KUR, serta melakukan komunikasi yang baik terhadap karyawan maupun nasabah, jadi dapat dikatakan bahwa Bank Sultra dalam memberikan informasi dan komunikasi sudah dapat menjalin komunikasi yang baik terhadap bawahan dalam hal ini yaitu kepada karyawan bank dan kepada nasabah.

5. Evaluasi Pemantauan atau *monitoring*

Pemantauan atau *monitoring* merupakan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal guna untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Dan *monitoring* ini merupakan poin terakhir dari sistem pengendalian internal pada Bank Sultra melakukan pengawasan atau *monitoring* dengan baik dapat dilihat dari pengendalian internal dalam sistem dan proses pemberian kredit, melakukan evaluasi setiap bulan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi dan dilakukan oleh *Account Officer*, Serta dapat melaporkan hasil *monitoringnya* kepada setiap divisi untuk di laporkan kepada Direksi.

Evaluasi Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra

Berdasarkan hasil yang telah di jelaskan diatas, maka hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra adalah:

1. Adanya animo dari masyarakat untuk lebih maju dengan memanfaatkan jasa perbankan,
2. Karna peluang kredit KUR untuk daerah sulawesi tenggara masih sangat di butuhkan oleh masyarakat,
3. Karena sumber daya manusia yang memadai dalam proses pemberian kredit KUR, dan
4. Adanya dukungan dari pemerintah dan asyaakat khususnya masyarakat sulawesi tenggara.

Sedangkan faktor pendukung tentu ada faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra adalah:

1. Ketidak sesuaian calon debitur dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian.
2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa krdit KUR ini adalah bantuan.
3. Disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak support atau tidak mendukung terhadap pemberian kedit KUR seperi pada kondisi saat munculnya wabah *Covid-19*.
4. Masyarakat yang tidak mempunyai usaha maka tidak dibeikan pinjaman dalam arti permohonan kredit ditolak,
5. Kurang bagus nya jalaan mnuju lokasi *survei* masyarakat yang mengambil kredit KUR.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra yakni:

1. Pada Sistem Pengendalian *Intern* Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra dapat dikatakan sudah efektif dalam menjalankan operasional perusahaannya, khususnya dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkait dengan: 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penaksiran resiko, 3) Aktivitas pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, serta 5) Pemantauan.
2. Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra yang menjadi faktor pendukung yakni :1) Adanya animo dari masyarakat untuk lebih maju dengan memanfaatkan jasa perbankan, 2) karena peluang kredit KUR untuk daerah sulawesi tenggara sulawesi tenggara masih sangat dibutuhkan, 3) Karena sumber daya manusia yang memadai dalam pemberian atau penyaluran kredit KUR, 4) Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat sulawesi tenggara. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat

(KUR) yakni: 1) Ketidak sesuaian calon debitur dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian, 2) Kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa kredit KUR ini adalah bantuan, 3) Di sebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak *support* atau tidak mendukung terhadap pemberian kredit KUR seperti pada kondisi saat munculnya wabah *Covid-19*, 4) Masyarakat yang tidak mempunyai usaha maka tidak diberikan pinjaman dalam artian permohonan kredit ditolak, dan 5) Kurang bagus nya jalanan menuju lokasi *survei* ke masyarakat yang mengambil kredit KUR.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Sultra terkait evaluasi sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan lebih fokus kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang *E-commerce* (usaha berbasis online atau digital) karena pada saat pandemi *Covid-19* *E-commerce* lebih pesat.
2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan masukan bagi Bank Sultra yang terkait dengan sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait sistem pengendalian *intern* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengambil objek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dina Marayanti Hutauruk. (2019). *Waktu penyaluran terbatas, Bank Sultra hanya realisasikan KUR Rp 25 miliar pada 2018*. Kontan.Co.Id. 22 Januari 2018. <https://amp.kontan.co.id/news/waktu-penyalaran-terbatas-bank-sultra-hanya-realisasikan-kur-rp-25-miliar-pada-2018>.
- Halim, Abdul. (2015). *Audit I. SN Ilmu Manajemen YKPN*. Yogyakarta.
- Kasmir.(2012). *Manajemen perbankan*.Jakarta. Rajagrafindo persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *“Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi” Edisi 4 Jakarta: Erlangga*.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Selemba Empat, Jakarta*.
- Pedoman Teknis. (2013). *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian*. Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Pedoman-Teknis-Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Sektor-Pertanian-2013.pdf>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum*.
- Redaksi PUBinfo. (2014). *Komite KUR - Komite Kredit Usaha Rakyat*. <https://www.pubinfo.id/instansi-631-komite-kur-komite-kredit-usaha-rakyat.html>.
- Safirah. (2018). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tulangnyuh Cabang Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), 460. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i2.20083>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Penerbit Bandung. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Wanangsari, & Iwan. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam “Kharisma Mitra Karya.” *Jurnal Komp*, 8(1)